See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/294738761>

Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolah...

Conference Paper · August 2014

CITATIONS

0

READS

407

3 authors, including:

Herman Sjahrudin

Brawijaya University

29 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Financial Banking [View project](#)

Extreme Behaviour [View project](#)

Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar)

Nurul Aini Sitepu¹, Herman Sjahruddin², Muh. Hamzah Idris³
^{1,2,3} (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, STIE YPBUP Bongaya)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan cara *eksplanatory research*. 48 orang pegawai digunakan sebagai populasi, sampel yang dianalisis sejumlah 30 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh (*sensus*). Pengujian hipotesis menggunakan regresi sederhana (*partial regression*) dengan bantuan *software statistical package for the social science* (SPSS) Ver 16. Angket yang didistribusikan memanfaatkan Skala Ordinal yang diukur melalui Skala Likert point 5. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa nilai koefisien regresi variabel Kompetensi aparatur teknik akuntansi sebesar 0,951 dengan nilai *t*-hitung sebesar 7,275 lebih besar dari nilai *t*-tabel yakni sebesar 2,052 sehingga dapat dinyatakan bahwa Kompetensi aparatur teknik akuntansi berpengaruh positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$), dengan demikian dapat dijelaskan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan, semakin tinggi kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi

Kata Kunci: Kompetensi, Kualitas Laporan Keuangan
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3007.7208>

I. ALatar Belakang

Paradigma sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan dari sentralistik ke arah desentralistik yang memberikan dampak terhadap hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya. Hubungan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk penggunaan sumber daya (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif (Bennet, 2010; dalam Bastian, 2006).

Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang, sekaligus kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dalam melakukan proses pendelegasian wewenang antara masyarakat selaku *principal* dengan pemerintah daerah selaku *agent*, serta pihak legislative yang bertindak, juga sebagai *principal* dengan pemerintah daerah (*agent*). Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu dengan melakukan pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggung jawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan

publik yang efektif (Widyananda, 2008).

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya reformasi pengelolaan keuangan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Desiana, 2012). Pemerintah Kota Makassar dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah dalam penelitian ini mengadopsi pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terdiri dari; (1) Relevan; (2) Dapat diandalkan; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencapaian tujuannya, dapat dilakukan dalam beberapa hal, seperti dengan peningkatan kinerja.

Pemenuhan kriteria kualitas laporan keuangan menuntut pegawai pengelolah keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dasar yang digunakan untuk menilai kualitas dari laporan keuangan, mengacu pada penilaian (opini) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Makassar, dalam bentuk penilaian sebagai berikut; (1) Wajar tanpa pengecualian (WTP); (2) Wajar dengan pengecualian (WDP); (3) Tidak wajar (TW); (4) Tidak memberikan pendapat (TMP). Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan (Setiyanti, 2013)

Laporan keuangan pemerintah Kota Makassar berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan Kota Makassar memperlihatkan adanya perubahan penilaian, secara garis besar dapat dijelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar cenderung memperlihatkan; (1) untuk opini WTP menunjukkan adanya peningkatan; (2) untuk opini WDP menunjukkan adanya penurunan; (3) untuk opini TW menunjukkan adanya penurunan; dan, (4) untuk opini TMP menunjukkan adanya penurunan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pada peningkatan dan penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh

pemerintah Kota Makassar secara umum dapat dinyatakan bahwa kinerja aparatur bagian verifikasi dan pembukuan mengalami peningkatan yang belum berarti (signifikan), karena laporan keuangan yang dihasilkan didalamnya masih terdapat opini Tidak Wajar (TW) sebesar 3% dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebesar 15%. kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparatur bagian verifikasi dan pembukuan yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan belum optimal karena masih terdapatnya opini yang dikeluarkan oleh BPK Kota Makassar yang berada dalam kategori Tidak wajar dan Tidak memberikan pendapat, fenomena tersebut memotivasi peneliti untuk menganalisis kinerja aparatur bagian verifikasi dan pembukuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan variabel kompetensi sebagai pembentuk kinerja aparatur (Pemerintah Kota Makassar, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya kausalitas antara pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan dibuktikan pada

penelitian yang menggunakan 86 satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Malang, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa variabel independen (kemampuan SDM) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap relevansi informasi sebagai karakteristik kualitas informasi laporan keuangan satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Malang (Choirunisah, 2008), Bukti tersebut menunjukkan adanya kesamaan dengan temuan penelitian Roviyantje dan Siliwangi (2011), yang melakukan penelitiannya pada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi SDM, pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sangat baik; (2) kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (3) kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Kompetensi

Kompetensi dinyatakan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas - tugas

pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu (Finch dan Crunkilton; dalam Mutyasa, 2004: 38) Pandangan lainnya menyatakan kompetensi sebagai merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan dari bidang tersebut (Wibowo, 2007). Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Kinerja pekerjaan dipengaruhi oleh : (a) pengetahuan, kemampuan, dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, kepentingan/minat, dasar-dasar, nilai sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan (Wibowo, 2007).

Pengukuran kompetensi menggunakan beberapa indikator, yaitu: (1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis, (2) Keterampilan (*Skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit, dan (3) Sikap (*Attitude*), yaitu yang ditujukan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya (Prayitno; dalam STIE LAN Makassar, 2012).

2.2. Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi (pernyataan manajemen yang

terkandung di dalam komponen laporan keuangan, pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini; Keberadaan atau keterjadian, Kelengkapan, Hak/kewajiban, dan Penilaian atau alokasi, serta Penyajian dan pengungkapan) dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2004) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: (1) Kepatuhan dan pengelolaan; (2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif; (3) Perencanaan dan informasi otorisasi; (4) Kelangsungan organisasi; (5) Hubungan masyarakat; dan (6) Sumber fakta dan gambaran. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah: (1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil

evaluasi mereka di masa lalu, (2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, (3) Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dan (4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Indikator pengukuran kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pengukuran kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari (1) relevan, (2) dapat diandalkan, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang datanya berwujud pada bilangan (angka-angka) dan pembuktian hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2011:15). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pegawai bagian verifikasi dan pembukuan

yang berjumlah 48 orang, metode penentuan sampel menggunakan metode sensus (*sampling jenuh*) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tingkat pengembalian kuesioner setelah diedarkan sebesar 63% atau 30 pegawai.

IV. Hasil Penelitian

4.1. Karakteristik Responden

Tabel I. Karakteristik Responden

Karakteristik/Profil Responden		Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1. Jenis Kelamin	1. Laki-laki	14	47
	2. Perempuan	16	53
	Jumlah	30	100
2. Masa Kerja	1. 1 – 5 tahun	13	43
	2. 6 – 10 tahun	5	17
	3. >10 tahun	12	40
	Jumlah	30	100
3. Jenjang Pendidikan	1. SMA/Sederajat	6	20
	2. Strata 1 (S1)	20	67
	3. Strata 2 (S2)	4	13
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer (diolah, 2014)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa Aparatur/pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan sekitar 16 orang atau sebesar 53% dan sisanya pegawai laki-laki sebesar 14 orang atau 47%. Pegawai yang memiliki masa kerja 1-5 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 43%, 5 orang dengan masa kerja 6-10 tahun atau sebesar 17%, dan untuk pegawai yang memiliki masa kerja >10 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pegawai memiliki masa kerja yang cukup memadai dalam pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai didominasi oleh Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 67%, dan sisanya sebanyak 6 orang dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat atau sebesar 20%, dan sebesar 13% atau sebanyak 4 orang yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2). Hal ini membuktikan bahwa

jenjang pendidikan para pegawai dapat menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai aparatur teknik akuntansi.

4.2. Uji Instrumen

Instrument dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi *product moment Pearson* diatas dari 0,30 pada taraf signifikansi 0.05. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur instrumen penelitian pada obyek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama (konsisten), (Sugiyono, 2011:147). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's Alpha* instrumen dari masing-masing lima dimensi yang diuji. Apabila nilai *Cronbach Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,6 maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai atau dinyatakan reliabel.

Tabel II. Uji Validitas dan Reliabilitas

Indikator Penelitian	Koefisien Korelasi (r)	Cronbach's Alpha	Sig.
Pengetahuan	0,893	0,885	0,000
Kemampuan	0,879		
Sikap	0,944		
Relevan	0,730		
Andal	0,887		
Dapat dibandingkan	0,909		
Dapat dipahami	0,769		

Sumber: Output SPSS (diolah, 2014)

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu

memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One*

Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang di-hasilkan > 0,05 maka distribusi datanya

dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal

Tabel III. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15801268
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.176
	Negative	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		.963
Asymp. Sig. (2-tailed)		.312

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS (diolah, 2014)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,963 dengan nilai signifikan 0,312. Berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 10% (0,1). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel yang digunakan. Hasil uji Multikolinieritas tampak pada Tabel berikut ini:

Tabel IV. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi	1.000	1.000

Sumber: Output SPSS (diolah, 2014)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena memiliki nilai VIF sebesar 1,000 < 10, dan nilai *tolerance* sebesar

1,000 > 0,1, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel yang digunakan.

4.4. Hasil Analisis Regresi Partial

Tabel V. Hasil Analisis Regresi Linier Partial

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	0,734	1,798	0,083
Kompetensi	0,951	7,275	0,000

Tabel V. Hasil Analisis Regresi Linier Partial (Lanjutan)

Adjusted R Square = 0,642	Sig = 0,000
---------------------------	-------------

Sumber : Output SPSS (diolah, 2014)

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa nilai t_{hitung} 7,275 > t_{tabel} 2,052 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel kompetensi aparatur teknik akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Makassar. Artinya bahwa terdapat pengaruh antara variabel kualitas aparatur teknik akuntansi yang ada pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Asset Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka teori kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1986); dalam Wibowo (2007) bahwa Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik individu yang mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Menurut (Spencer dan Spencer, 1986; dalam Wibowo, 2007) terdapat lima karakteristik kompetensi yaitu; motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Teori kompetensi tersebut digunakan sebagai dasar rujukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Prayitno; dalam STIE LAN

Makassar, 2012) dalam menjelaskan kompetensi yang kemudian diadopsi oleh peneliti melalui indikator kemampuan, pengetahuan dan sikap.

Berdasarkan tanggapan responden indikator variabel kompetensi yang dicerminkan melalui indikator kemampuan aparatur sebesar 4,23 yang juga merupakan nilai rerata tertinggi dibandingkan indikator variabel kompetensi lainnya yaitu pengetahuan sebesar 4,18 dan nilai rerata terendah untuk indikator variabel kompetensi adalah indikator sikap yaitu sebesar 4,14. Nilai rata-rata indikator yang berada diatas skala 4,00 menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur teknik akuntansi Badan Pengelolah Keuangan dan Asset (BPKA) Pemerintah Kota Makassar adalah kompetensi yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian kompetensi aparatur teknik akuntansi memberikan pengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur teknik akuntansi maka akan semakin memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hasil dari penelitian ini ikut mendukung atau menerima teori kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1986); dalam Wibowo

(2008) bahwa kompetensi individu sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur melaksanakan tugasnya dalam menyusun laporan keuangan, selanjutnya diikuti oleh pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur dalam memahami standar akuntansi pemerintahan dan aturan-aturan yang berlaku, serta sikap aparatur dalam bekerja, dan mematuhi norma-norma sosial.

Hasil penelitian mendukung teori kinerja yang dikemukakan oleh Robbins bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja dalam melaksanakan tugasnya baik itu kualitas, kuantitas, waktu, dan kesungguhan yang dapat dicapai oleh pegawai (Robbins, 1998; dalam Sutrisno, 2009). Kinerja pegawai yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kualitas dari laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Kinerja Pegawai atau aparatur merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan atau dengan kata lain pencapaian kinerja individu dapat dilakukan dengan adanya kemampuan, motivasi dan kesempatan. Berdasarkan tanggapan responden variabel kompetensi yang dicerminkan melalui indikator kemampuan aparatur sebesar 4,23 yang juga merupakan nilai rerata tertinggi dibandingkan indikator variabel kompetensi lainnya yaitu pengetahuan sebesar 4,18 dan nilai rerata terendah untuk indikator variabel kompetensi adalah indikator sikap yaitu sebesar 4,14. Pencapaian kinerja yang baik dilandasi dengan kompetensi yang tinggi.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan

Nahartyo (2008) yang memberikan bukti bahwa Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. Pegawai atau aparatur yang memahami dan memiliki kompetensi dibidang akuntansi (keuangan) dibutuhkan oleh Pemerintah untuk dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar yang berkualitas

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar masih memperoleh opini TW (Tidak Wajar) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Kota Makassar. Hal ini berarti Pegawai atau aparatur perlu mengoptimalkan atau meningkatkan kompetensinya dibidang akuntansi (pembukuan) agar dapat menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, pegawai atau aparatur perlu mengikuti bimbingan teknis, workshop serta pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai keuangan pemerintahan secara rutin dan tekun. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai praktik pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan juga perlu diterapkan secara tegas dan tepat agar para aparatur dapat menyelesaikan tugasnya berdasarkan standar atau aturan-aturan yang berlaku.

V. Kesimpulan

Kompetensi yang tinggi dari para aparatur sangat dibutuhkan oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya untuk mempertahankan kemampuan bekerjasama dengan rekan kerja yang dimiliki oleh aparatur teknik akuntansi dalam bekerja. Kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan dapat dipertahankan dengan cara mengoptimalkan tingginya Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar, dengan tingkat signifikansinya sebesar ($0.000 < 0.05$), Hasil pengujian menyatakan bahwa kompetensi aparatur teknik akuntansi memberikan pengaruh sebesar 65,40% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Peningkatan kompetensinya, aparatur dapat dilakukan dengan

meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma social dalam melaksanakan pekerjaannya dan untuk meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan, istilah-istilah yang terkandung dalam laporan keuangan perlu diperhatikan sehingga informasi yang disediakan nantinya dapat di pahami oleh para pengguna. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan variabel kompetensi sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan oleh karena itu peneliti menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya perlu untuk menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah, seperti Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPAP), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Choirunisah, Fariziah. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi. Yogyakarta : Tesis UGM
- Desiana, (2012). Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah, Universitas Siliwangi, Malang
- Indriasari dan Nahartyo, (2009). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.

- Mutyasa, (2004). Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Motivasi. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya offset
- Pemerintah Kota Makassar. (2014). Laporan keuangan Tahun 2013.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*
- Roviyantie, D., & Siliwangi, U. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Setiyanti, S. W. (2013). Jenis-Jenis Pendapat Auditor (Opini Auditor). Jurnal STIE Semarang
- Sugiyono, (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana
- Tim Peneliti STIE LAN Makassar. (2012). Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah di Indonesia, STIE LAN, Makassar
- Wibowo, (2007). Manajemen Kinerja, Jakarta : Rajawali Pers
- Widyananda, H. (2008). Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakan Good Governance di Indonesia. Publikasi, Seminar, Makalah dan Sambutan BPK RI Nomor: 3/PUB/VI/12/2008. Universitas Padjajaran